

luwu timur
inspiring
MAJU DAN BERKELANJUTAN



RENCANA KERJA 2024

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan penuh rasa syukur, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT atas petunjuk, rahmat, dan karunia-Nya yang melimpah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah sebuah langkah yang strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BKAD Kabupaten Luwu Timur sebagai lembaga penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah turut berkomitmen untuk menyusun Renja ini dengan cermat dan terencana. Analisis kebutuhan dan strategi yang telah dilakukan senantiasa mengacu pada rencana pembangunan daerah, sehingga Renja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kami berharap Renja BKAD tahun 2024 dapat menjadi panduan yang kokoh dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, diharapkan Renja ini akan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Luwu Timur.

Kepada semua pihak yang telah turut serta dalam proses penyusunan Renja ini, kami sampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya dalam setiap langkah kita untuk kemajuan daerah ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mali, 28 Juni 2023
KEPALA BKAD Kab. Luwu Timur



Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E. M.M
Pkt : Pembina Utama Muda
Nip : 197008142002121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKAD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD.....	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal BKAD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BKAD	50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD	51
3.3 Program dan Kegiatan BKAD	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKAD	56
BAB V PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, perlu menyusun rencana kerja tahun 2024 sebagai pelaksanaan tahunan dari Rencana strategis 5 tahun Badan Keuangan Daerah dan Aset daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penunjang dalam tata kelola keuangan daerah, sehingga penyusunan program kegiatan, Indikator kinerja dan dana indikatif dalam rencana kerja disusun dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD tahun 2024.

Rencana Kerja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis. oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset daerah dapat

dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Keuangan dan Aset daerah, evaluasi pencapaian Rencana Kerja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan keuangan dan Aset daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
9. Permendagri 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan keuangan dan Aset Daerah untuk pelaksanaan kerja 1 tahun;
- b. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan;
- c. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 sebagai landasan operasional unsur pimpinan dan staf dalam pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun dengan kerangka sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- f. Menyusun penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP)

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD

dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BKAD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat uraian tentang gambaran kedudukan BKAD, rencana Kerja BKAD, keterkaitan antara Renja BKAD dengan Dokumen RKPD dan Renstra BKAD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BKAD Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BKAD, serta susunan garisbesar isi dokumen setiap BAB beserta Sub BAB sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKAD DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja BKAD Tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD.

Memberikan uraian dan penjelasan dari hasil pelaksanaan Renja setiap program kegiatan dan capaian Renstra BKAD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD

Menjelaskan dan menyajikan hasil analisa kinerja pelayanan BKAD serta indikator yang mempengaruhi kinerja tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Permasalahan yang dikedepankan untuk ditanggapi yang dianggap penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menyajikan tabel perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menggambarkan dan menguraikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKAD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan dan menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKAD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD

Menguraikan dan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas tucusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD.

3.3 Program dan Kegiatan BKAD

Menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BKAD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai salah satu instansi yang berperan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam kegiatannya harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra pada tahun lalu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BKAD dalam mencapai target yang telah ditetapkan serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan aset daerah.

Pada tahun lalu, pelaksanaan Renja BKAD telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian target yang telah ditetapkan. Selain itu, BKAD juga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa BKAD telah berhasil mengelola keuangan dan aset daerah dengan baik.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih dan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun berjalan dan perkiraan target tahun 2024.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2022 dan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D 2022
Kabupaten Luwu Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020(tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020(tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan			
					Target Renja SKPD 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4				
1	WAJIB													
1	05	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	05	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	100 %	50 %	50 %	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00 %	2 Dokumen	1 Dokumen	7 %

1	051	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu	10	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0,00 %	2	Doku men	-	Doku men	0 %	
1	051	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu	10	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0,00 %	2	Doku men	-	Doku men	0 %	
1	051	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	50	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0,00 %	10	Doku men	6	Doku men	12 %	
1	051	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	%	0	%	0	%	0	%	0,00 %	98	%	50,00	%	50,00	%
1	051	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	71	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00 %	25	Orang	25	Orang	35 %	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	95	%	0	%	0	%	0	%	0,00 %	95	%	90	%	94,74	%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	5	Doku men		Doku men		Doku men		Doku men	0,00	1	Doku men	1	Doku men	0 %	
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan	95	%	0	%	0	%	0	%	0,00	95	%	-	%	0 %	
1	051	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	95	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0	Doku men	0,00 %	19	Doku men	9	Doku men	9 %	

1	05	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	98 %	50 %	50 %
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	20 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00 %	4 Dokumen	2 Dokumen	10 %
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	95 %	50 %	50 %
1	05	01	2.05	02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	98 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	98 %	90 %	92 %
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2250 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	450 Orang	125 Orang	6 %
1	05	02	01	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	234 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00 %	46 Orang	15 Orang	6 %
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	95 %	%	0,0 %
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	120 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0,00 %	5 jenis	5 jenis	4 %

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 Unit	Unit	Unit	Unit	0,00	2 Unit	5 Unit	25 %
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	126 Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	0,00	18 jenis	18 jenis	14 %
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	15 Jenis	Jenis	Jenis	Jenis	0,00	3 jenis	3 jenis	20 %
1	05	01	206	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	720 eksp	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00 %	48 Eksampler	24 Eksampler	3 %
1	05	01	206	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	12500 orang	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0,00 %	2420 Orang	1.230 Orang	10 %
1	05	01	206	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	1400 Kali	0 eksp	0 eksp	0 eksp	0,00 %	250 Kali	120 Kali	9 %
1	05	01	207		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	97 %	25,00 %	25,00 %
1	05	01	207	01	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	100 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00 %	15 Unit	8 Unit	0 %
1	05	01	207	06	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	33 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	14 Unit	- Unit	0 %
1	05	01	207	11	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	2 Unit	0 Unit	0 %
1	05	01	207	05	pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	43 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	7 Unit	5 Unit	12 %

					gedung kantor atau bangunan lainnya	bangunan lainnya yang diadakan													
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	100 %	25,00 %	25,00 %					
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	3000 Surat	0 surat	0 surat	0 surat	0,00 %	6.000 Surat	3.100 Surat	10 %					
1	05	01	2.08	04	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	189 rekening	0 rekening	0 rekening	0 Orang	0,00 %	24 Rekening	12 Rekening	6 %					
1	05	01	2.08	02	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	32 Orang	0 Orang	0 Orang	0 rekening	0,00 %	3 Orang	2 Orang	6 %					
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	95 %	25,00 %	25,00 %					
1	05	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	19 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	8 unit	7 Unit	37 %					
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	75 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	66 Unit	11 Unit	15 %					

1	05	01	209	06	pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00 %	1 Unit	1 Unit	100 %
1	05	02	05	06	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(1) Persentase kesesuaian pagu anggaran KUA-PPAS dan APBD	100 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	100 %	25,00 %	25,00 %
						(2) Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	100 %	0 %			0,00 %	100 %	0,00 %	0,00
						(3) Persentase kemandirian keuangan untuk memenuhi belanja daerah	92 %	0 %			0,00 %	92 %	0,00 %	0,00
						(4) Persentase transparansi pengelolaan keuangan daerah yang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	90 %	0 %			0,00 %	90 %	0,00 %	0,00
						(5) Persentase realisasi penyerapan anggaran belanja APBD yang optimal	95 %	0 %	0 %	0 %	0,00 %	95 %	- %	0 %
						(6)Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	0 %	0 %	0 Opini	0,00 %	WTP Opini	Opini	100 %

1	0	0	2.		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	10	Minggu	0	Minggu	0	Minggu	0	%	0,00	%	10	Minggu	Minggu	0,00	%	
					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	10	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	%	0,00	%	2	Dokumen	-	Dokumen	0,00	%
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun	10	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	%	0,00	%	2	Dokumen	-	Dokumen	0,00	%
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	5	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	%	0,00	%	59	Dokumen	-	Dokumen	0,00	%
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	5	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	%	0,00	%	59	Dokumen	-	Dokumen	0,00	%
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi	71	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	%	0,00	%	71	Dokumen	12	Dokumen	16,90	%
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen perda tentang APBD dan perbup tentang penjabaran APBD yang disusun yang responsif gender	10	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	%	0,00	%	2	Dokumen	-	Dokumen	0,00	%
					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah	Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	10	Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	%	0,00	%	3	Dokumen	1	Dokumen	10,00	%

					tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perubahan APBD yang tersusun yang responsif gender											
					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang tersusun	75	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0, 00 %	42	Doku men	27	Doku men	36,0 0 %
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	20	Lapor an	Lapor an	Lapor an	0 %	0, 00 %	4	Lapor an	2	Lapor an	10,0 0 %
					Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan perencanaan penganggaran daerah kabupaten/kota	20	Lapor an	Lapor an	Lapor an	0 %	0, 00 %	4	Lapor an	2	Lapor an	10,0 0 %
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	%	%	%	0 %	0, 00 %	100	%	100	%	100, 00 %
					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan pengelolaan kas daerah yang telah direkonsiliasi	180	Lapor an	Lapor an	Lapor an	0 %	0, 00 %	12	Lapor an	6	Lapor an	3,33 %
					Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan	Jumlah dokumen laporan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	60	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0, 00 %	12	Doku men	6	Doku men	10,0 0 %

					dan Dana Transfer Lainnya										
					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran OPD yang telah di rekonsiliasi	354 0	Lapor an	Lapor an	Lapor an	0 %	0, 00 %	1.416 Lapor an	3.283 Lapor an	92,7 4 %
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	100	%	%	%	0 %	0, 00 %	97 %	%	0,00 %
					Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan akuntansi	24	Lapor an	Lapor an	Lapor an	0 %	0, 00 %	12 Lapor an	6 Lapor an	25,0 0 %
					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan yang telah direkonsiliasi	112 0	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0, 00 %	224 Doku men	59 Doku men	5,27 %
					Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semester yang disusun	90	Lapor an	Lapor an	Lapor an	0 %	0, 00 %	18 Lapor an	10 Lapor an	11,1 1 %
					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan yang dikonsolidasikan	90	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0, 00 %	18 Doku men	10 Doku men	11,1 1 %

					Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	jumlah dokumen ranperda dan ranperbup yang tersusun	10	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0, 00 %	2	Doku men	1	Doku men	10,0 0 %
					Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah dokumen LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun	5	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0, 00 %	1	Doku men	0	Doku men	0,00 %
					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah regulasi kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun	10	Doku men	Doku men	Doku men	0 %	0, 00 %	2	Doku men	0	Doku men	0,00 %
					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan akuntansi	6	Lapor an	Lapor an	Lapor an	0 %	0, 00 %	2	Lapor an	1	Lapor an	16,6 7 %
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan		%	%	%	0 %	0, 00 %	94	%		%	#DIV /0!
					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah belanja transfer ke desa	125	Desa	Desa	Desa	0 %	0, 00 %	124	Desa	124	Desa	99,2 0 %

						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen dana darurat dan mendesak yang dikelola	15	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	3	Dokumen	-	Dokumen	0,00 %	
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	90	%	%	%	0	0,00	%	90	%	%	0,00	%
						Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	59	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	0 %	0,00 %	59	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	0,00 %	
						penyusunan standar harga	Jumlah dokumen standar harga	10	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	2	Dokumen	1	Dokumen	10,00 %	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah	64	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	2	Dokumen	1	Dokumen	1,56 %	
						penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun	10	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	2	Dokumen	1	Dokumen	10,00 %	
						inventarisasi barang milik daerah	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah yang disusun	15	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	2	Dokumen	1	Dokumen	6,67 %	
						pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan berita acara serah terima BMD yang dilakukan	20	Laporan	Laporan	Laporan	0 %	0,00 %	2	Laporan	1	Laporan	5,00 %	
						penilaian barang milik daerah	jumlah dokumen penilaian BMD yang disusun	10	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	2	Dokumen	-	Dokumen	0,00 %	

					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD yang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian	20	Laporan	Laporan	Laporan	0 %	0,00 %	2	Laporan	- Laporan	0,00 %	
					Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD yang optimal	10	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	2	Dokumen	1 Dokumen	10,00 %	
					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah berita acara rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan	5	Laporan	Laporan	Laporan	0 %	0,00 %	2	Laporan	1 Laporan	20,00 %	
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	5	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 %	0,00 %	1	Dokumen	1 Dokumen	20,00 %	
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	10	Laporan	Laporan	Laporan	0 %	0,00 %	2	Laporan	0 Laporan	0,00 %	

2.2 Analisis Kinerja BKAD.

BKAD Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 pada Misi 4 yaitu **Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik** dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani dan sasarannya meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan maka dalam pelaksanaan tugas BKAD untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran Daerah;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan Daerah;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dari tugas dan fungsi BKAD dimaksud, secara rinci jenis pelayanan yang diberikan, meliputi:

1. Melaksanakan proses perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
2. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian pengelolaan Keuangan Daerah secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maupun secara horizontal yakni antar Perangkat Daerah;

3. Melaksanakan Penatausahaan Aset Daerah;
4. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi Keuangan Daerah;
5. Memberikan informasi dan Data potensi Keuangan Daerah;

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dengan menggunakan indikator kinerja, organisasi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja mereka, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan target, yang dapat dilihat pada pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target
Badan Keuangan dan Aset Daerh Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Mewujudkan pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas keuangan daerah	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	60 Hari
			Penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu	80 Hari

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Capaian Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur tahunlalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, adapun rumusan kebijakan dalam

tupoksi BKAD meliputi:

- a. Kebijakan perencanaan anggaran daerah;
- b. Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- c. Kebijakan perbendaharaan daerah; dan
- d. Kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

Analisis Kinerja berdasarkan kebijakan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang terdiri dari Indikator Kinerja dan Indikator Sasaran. Target dari Indikator Kinerja Tujuan dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tahun Ke-				
		2022	2022	2024	2025	2026
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

Pada tabel 2.3 diatas, Tujuan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel dengan Indikator Kinerja Tujuan adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Opini Wajar tanpa pengecualian adalah menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.

Pada Tabel 2.4 berikut disajikan capaian realisasi Indikator Kinerja Tujuan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.4
Capaian Realisasi dari Target Indikator Kinerja Tujuan

OPINI BPK	CAPAIAN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI

Pada Indikator Kinerja Tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya baik target dan capaian relisasinya pada tahun-tahun sebelumnya, maka perlu diuraikan juga Analisis kinerja pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berpedoman pada Indikator Kinerja Sasaranyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Tabel Indikator Kinerja Sasaran OPD

Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari	60 Hari
Penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari	80 Hari

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

Pada tabel 2.5 Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari dua indikator Sasaran yaitu : *Pertama*, Persetujuan bersama Ranperda dan Ranperbup APBD tepat waktu dengan target 60 hari kerja dan *Kedua*, Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tepat waktu dengan target 80

hari. Penetapan target jumlah hari kerja pada Indikator Sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Sasaran sebagai salah satu Indikator Pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pencapaian tahun-tahun sebelumnya, masih mengacu pada Indikator Sasaran yang lama sebagaimana yang termuat pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2016-2021 yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2016-2021 yaitu Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah. berikut pada tabel 2.6 disajikan capaian dari Indikator Sasaran dari tahun 2018-2021.

Tabel 2.6
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Sasaran BPKAD

Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah	92,00 %	94,00 %	95,00 %	97,00 %	92,00 %	96,00 %	97,00 %	98,00 %	

Sumber : Lakip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2021

Pada Tabel 2.6 diatas, Capaian Realisasi Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan hasil yang baik. Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah mencapai angka di atas 90 persen. Capaian tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai 98 persen.

Berdasarkan capaian realisasi Indikator sasaran diatas, maka dapat di simpulkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Badan Keuangan dan Aset Daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai

posisi yang penting dalam tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Luwu timur. Hal ini sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menyebutkan Pejabat pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih terdapat Isu-isu Penting sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Regulasi pengelolaan keuangan daerah belum update;
3. Belum maksimalnya Pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;
4. Belum maksimalnya data akurat barang milik daerah melalui inventarisasi/ sensus barang milik daerah;
5. Belum berkembangnya Inovasi pengelolaan barang milik daerah terkait tanah dan bangunan melalui sistem informasi;

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Diperlukan pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Diperlukan penguatan Regulasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Penguatan Pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;
4. Verifikasi data barang milik daerah melalui inventarisasi/ sensus barang milik daerah;
5. Pengembangan Inovasi pengelolaan barang milik daerah terkait tanah dan bangunan melalui Sistem informasi berbasis GIS.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagaimana tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Malili	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95,30	58,622,987,310	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Malili	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95,5%	36.483.885.700	
a.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat (%)	100	340,000,000	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat (%)	100%	168.347.950	
1.	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Malili	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	3	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Malili	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2	79.353.850	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Malili	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil	2	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Malili	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	3.699.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	RKA-SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)					Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)			
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Malili	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (dokumen)	2	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Malili	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (dokumen)	2	3.084.650	
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Malili	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	82.210.050	
b	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	98	55,117,498,541	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	98	34.110.510.650	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malili	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	46	54,677,498,541	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malili	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	28	33.549.860.700	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Malili	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7000	160.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Malili	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	139.260.000	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Malili	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Malili	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	129.549.950	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Malili	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19	280.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Malili	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19	291.840.000	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	98	24,000,000	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	98	17.090.000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Malili	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	24.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Malili	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		17.090.000	
e	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	484,810,000	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	453.915.400	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Malili	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (%)	12	100.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Malili	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (%)	2	72.220.000	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	450	85.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	230	62.885.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			perundang-undangan (orang)					perundang-undangan (orang)			
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	44	299.180.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	50	318.810.000	
F	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah (%)	95	976,978,425	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah (%)	95	752.206.200	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Malili	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	4	14,978,425	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Malili	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	4	15.495.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Malili	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	22	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Malili	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	4	12.050.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malili	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	3	65.000.0000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malili	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	5	39.950.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	132	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	144	17.640.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Malili	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	6250	90.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Malili	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	2	54.450.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malili	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	750.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malili	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175	612.621.200	
h	KEGIATAN JASA PENUNJANG	Malili	Persentase Rata-Rata	100	506,910,690	PENYEDIAAN JASA	Malili	Persentase Rata-Rata	100	323.125.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH		Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Malili	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24	40,910,690	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Malili	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	78.325.500	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Malili	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	36	282.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Malili	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	12	204.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Malili	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	5	184.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Malili	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12	40.800.000	
i	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG	Malili	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan	95	328,000,000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	Malili	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan	95	658.690.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)			PEMERINTAHAN DAERAH		pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Malili	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Malili	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	56.000.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Malili	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	69	88,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Malili	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	66	62.690.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Malili	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	120.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Malili	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	540.000.000	
B	PROGRAM PENGELO LAAN KEUANGA	Malili	Persentase meningkatnya kualitas	96,70	204,032,352,833	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Malili	Persentase meningkatnya kualitas	96,70	315.963.762.570	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	N DAERAH		pengelolaan keuangan daerah (Persen)					pengelolaan keuangan daerah (Persen)			
a	KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Malili	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)	10	1,427,023,383	KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Malili	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)	10	1.436.204.300	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	70,458,722	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	2	101.249.300	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Malili	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun (dokumen)	1	65,586,968	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Malili	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun (dokumen)	2	92.174.400	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Malili	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Malili	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	59	17.226.450	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Malili	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	1	19,024,606	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Malili	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	59	19.022.650	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Malili	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	1	19,024,606	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Malili	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	71	19.022.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Malili	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (dokumen)	2	555,616,670	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Malili	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (dokumen)	2	520.561.100	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Malili	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2	543,361,811	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Malili	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	4	504.256.850	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Perubahan APBD (dokumen)					Perubahan APBD (dokumen)			
8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Malili	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (dokumen)	15	59,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Malili	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (dokumen)	34	85.231.750	
9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Malili	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (dokumen)	4	94,350,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Malili	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (dokumen)	4	57.235.800	
10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota (orang)			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota (orang)	236	20.224.000	
b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Malili	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan	97	955,500,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Malili	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan	97	711.789.500	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			peraturan perundang-undangan (%)					peraturan perundang-undangan (%)			
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	129.999.950	
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya (dokumen)			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya (dokumen)	12	506.789.800	
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan	Malili	jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan	Malili	jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas	240	74.999.750	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Atas SP2D dengan Instansi Terkait		serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			Atas SP2D dengan Instansi Terkait		serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			
c	KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Malili	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)	97	955,500,000	KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Malili	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)	97	1.225.466.500	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Malili	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	18.500	221,800,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Malili	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	75.936.000	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	236	55.425.750	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semeteran	Malili	Jumlah Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semeteran (laporan)	16	155.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semeteran	Malili	Jumlah Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semeteran (laporan)	18	279.469.700	
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Malili	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi (Laporan)	12	99.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Malili	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi (Laporan)	18	115.076.700	
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan	Malili	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan	2	439,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban	Malili	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan	18	505.754.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)			Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)			
6	Penyusunan Tanggapan/Tindakan Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Malili	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindakan Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	1	40,200,000	Penyusunan Tanggapan/Tindakan Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Malili	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindakan Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	1	29.879.750	
8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Malili	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Malili	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa	2	32.164.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Akuntansi Pemerintah Daerah		n Akuntansi Pemerintah Daerah			Akuntansi Pemerintah Daerah		n Akuntansi Pemerintah Daerah			
9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (laporan)			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (laporan)	320	131.759.850	
d	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Malili	Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan (%)	95	201,649,829,450	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Malili	Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan (%)	96	340.117.227	
3	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	127	195,149,829,450	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	3	336.617.227.295	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Malili	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	6.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Malili	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	3.500.000.000	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Malili	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)	58	593,600,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Malili	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)	93	858.886.540	
a.	KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Malili	Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	90	593,600,000	KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Malili	Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	58	858.886.540	
1	Penyusunan Standar Harga	Malili	Jumlah Standar Harga yang disusun (Dokumen)	2	41,200,000	Penyusunan Standar Harga	Malili	Jumlah Standar Harga yang disusun (Dokumen)	1	35.286.900	
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	30.702.700	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	189,500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	156.111.980	
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	2	60,200,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	31.951.960	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (laporan)	2	111,100,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (laporan)	2	45.456.050	
8	Penilaian Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	2	85,100,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	2	74.924.650	
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi	90	106,500,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi	4	209.539.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (dokumen)			Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (dokumen)			
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah (laporan)			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah (laporan)	118	31.023.800	
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun (Laporan)			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun (Laporan)	1	29.859.250	
13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	214.029.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemerintah Kabupaten/Kota					Pemerintah Kabupaten/Kota			
	Jumlah				266,468,038,143	Jumlah				380.833.459.835	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dalam tata kelola keuangan daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola keuangan daerah.

Badan Keuangan dan Aset daerah kabupaten Luwu Timur memberikan Informasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi anggaran terhadap rancangan anggaran program kegiatan yang di usulkan oleh OPD lingkup Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2024 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,”.

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Untuk ikut mendorong pelaksanaan arah pembangunan nasional tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan

pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai Induk dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD harus terintegrasi dengan RPJMN. walaupun dimungkinkan adanya, perbedaan prioritas pembangunan menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis yang bertujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan Pembangunan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengacu kepada Misi 4 yakni terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dengan arah kebijakan terciptanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Adapun Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Timur

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah	1. Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu 2. Penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.

Dalam Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan Badan Keuangan yang disusun terintegrasi dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset daerah sebagai OPD bertugas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah lingkup Kabupaten Luwu Timur.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1.1	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1 KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

- 1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
- 1.3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 1.4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- 1.5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 1.7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 1.8 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 1.9 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- 1.10 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

2 KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

- 2.1 Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah
- 2.2 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer
- 2.3 Rekonsiliasi Data Ta Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan instansi terkait

3 KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- 3.2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiba, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,

- Pembiayaan, Pendapatan-LO dan beban
- 3.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- 3.4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 3.6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 3.7 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
- 3.8 Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
- 3.9 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota

4 KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

No PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1 KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- 1.1 Penyusunan Standar Harga
- 1.2 Penyusunan Standar Barang Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 1.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 1.4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 1.6 Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 1.7 Pengamanan Barang Milik Daerah
- 1.8 Penilaian Barang Milik Daerah
- 1.9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 1.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 1.11 Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 1.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 1.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (RENSTRA BKAD) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibuat setiap tahun. Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 3 program, 12 kegiatan dan 57 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 380.833.459.835. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95,5%	36.483.885.700	APBD
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	168.347.950	APBD
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	79.353.850	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.699.400	APBD
3)	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.084.650	APBD
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	82.210.050	APBD
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	34.110.510.650	APBD

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	33.549.860.700	APBD
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	139.260.000	APBD
3)	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	129.549.950	APBD
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	291.840.000	APBD
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98%	17.090.000	APBD
1)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.090.000	APBD
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	453.915.400	APBD
1)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98 Persen	72.220.000	APBD
2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	230 orang	62.885.400	APBD
3)	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50 orang	318.810.000	APBD
f	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	752.206.200	APBD
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	15.495.000	APBD
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	12.050.000	APBD
3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	39.950.000	APBD
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	144 Dokumen	17.640.000	APBD
5)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	54.450.000	APBD
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 Laporan	612.621.200	APBD
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	323.125.500	
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	78.325.500	APBD

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	204.000.000	APBD
3)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	40.800.000	APBD
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	658.690.000	
1)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	10 unit	56.000.000	APBD
2)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	66 unit	62.690.000	APBD
3)	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	540.000.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	97%	343.490.687.595	
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10 Minggu	1.436.204.300	
1)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	101.249.300	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	92.174.400	APBD
3)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	59 Dokumen	17.226.450	APBD
4)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	59 Dokumen	19.022.650	APBD
5)	Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	71 Dokumen	19.022.000	APBD
6)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	520.561.100	APBD
7)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	504.256.850	APBD
8)	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	34 Dokumen	85.231.750	APBD
9)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	57.235.800	APBD

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
10)	Pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	236 Orang	20.224.000	APBD
b)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	97%	711.789.500	
1)	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	12 Laporan	129.999.950	APBD
2)	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 dokumen	506.789.800	APBD
3)	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	240 dokumen	74.999.750	APBD
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	97%	1.225.466.500	
1)	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	75.936.000	APBD
2)	Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	236 Dokumen	55.425.750	APBD
3)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	18 Laporan	279.469.700	APBD
4)	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	18 Laporan	115.076.700	APBD
5)	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2 Dokumen	505.754.000	APBD
6)	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	29.879.750	APBD

1	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
7)	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	2 dokumen	32.164.750	APBD
8)	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan petanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	320 orang	131.759.850	APBD
d	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	96%	313.197.123.400	
3)	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	3 Laporan	336.617.227.295	APBD
4)	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	3.500.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	93%	828.839.316	
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah	58 Perangkat Daerah	828.839.316	
1)	penyusunan standar harga	1 Dokumen	35.286.900	APBD
2)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30.702.700	APBD
3)	penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	156.111.980	APBD
4)	inventarisasi barang milik daerah	1 Laporan	31.951.960	APBD
5)	pengamanan barang milik daerah	2 Laporan	45.456.050	APBD
6)	penilaian barang milik daerah	2 Laporan	74.924.650	APBD
7)	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	4 Dokumen	209.539.500	APBD
8)	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	118 Laporan	31.023.800	APBD
9)	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	29.859.250	APBD
10)	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	214.029.750	APBD
JUMLAH			380.833.459.835	

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan Penjabaran dalam Mewujudkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan tahunan. Selain itu, Renja sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan. Harapannya, keberhasilan pembangunan jangka pendek untuk Urusan Pengelolaan Keuangan serta Urusan Pengelolaan Aset Daerah dapat mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah tahun 2024 dengan meningkatkan kinerja yang telah dicapai dan membenahi yang masih kurang.

Rencana Kerja tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan Daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Dengan tersusunnya Renja Tahun 2024 Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar bidang, pegawai, dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan asset daerah, serta Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dalam laporan Triwulan masing-masing bidang atau penanggung jawab Program dan kegiatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, komitmen dan rasa tanggung jawab, etos kerja seluruh aparatur di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Luwu Timur, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 untuk menjadi perhatian dan Pedoman bagi masing-masing bidang pada lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan Program kegiatannya selama tahun 2024.

Malili, 28 Juni 2023

Kepala BKAD,



Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E. M.M

Pkt : Pembina Utama Muda

Nip : 197008142002121006